

Daftar Pustaka

Buku:

- Abubakar, Iskandar, *Transportasi Penyeberangan Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2015.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Ariman, Rasyid, dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016.
- Bakhri, Syaiful, *Perkembangan Stelse Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Hiariej, Eddy O.S, *Lex Specialis Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Kompas, 2018.
- Ibrahim, Johnny, *Teol dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2012.
- Kansil, C.S.T., *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2014.
- Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2001.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 2014.
- Makaraao, Mohammad Taufik, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta Kencana: Prenada Media, 2005.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Motik, Chandra, *Menyongsong Ombak Laut*, Jakarta: Genta Sriwijaya, 2003.

- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: Citra Aditya Bakri, 2013.
- Octorina, Dyah, dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Pawennei, Mulyati, *Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Hukum Laut Bagi Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 2001.
- Purba, Hasim, *Hukum Pengangkutan di Laut*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2005.
- Rahardjo, Saptono, *Kitab Undang-Undang Hukum*, Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2017.
- Ruslan, Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Centra, 2011.
- Salim, Abbas H.S, *Pengelolaan dan Pengembangan Transportasi*, Semarang: Khatulistiwa, 2000.
- Siswanta, Slamet, *Pidana Pengawasan Dalam Sistem Pidana Di Indonesia*, Semarang: Program Pasca sarjana Ilmu Hukum UNDIP, 2017.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suparni, Niniek, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pidanaaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Syamsudin, M., *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syarifin, Pipin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

- Tjakranegara, Soegijatno, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Umar, Hussyen, *Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran di Indonesia: Buku I*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.
- _____, *Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim*, Jakarta: Ind-Hilco, 2008.
- Yosafat, Christo, *Tinjauan Yuridis Dampak Penerapan Asas Cabotage Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Terhadap Jasa Perhubungan laut*, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.
- Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Artikel Jurnal:

- Barus, Viana I R br, dan Paramita Prananingtyas, “Tugas dan Tanggung Jawab Syahbandar dalam Kegiatan Pengangkutan Laut di Indonesia”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 1, 2017. <https://media.neliti.com/media/publications/59543-ID-tugas-dan-tanggung-jawab-syahbandar-dala.pdf>.
- Eddyono, Luthfi Widagdo, “Konstitusionalitas Undang-Undang Pelayaran”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 8, No. 2, Agustus 2019. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/Luthfi.pdf>.
- Fakhrurrozi, “Tanggung Jawab Pidana Bagi Nakhoda Kapal Yang Berlayar Tanpa Surat Persetujuan Berlayar”, *Juristuc*, Vol. 1 No. 3 Desember 2020. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/JRS/article/viewFile/1844/pdf>.
- Hamdi, Mirja Fauzul, “Kewenangan Pemerintah Terhadap Keselamatan Dan Keamanan Perairan Indonesia”, *Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 1, Januari-Juni 2016. <https://www.ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/24/5>.
- Hanok, Christine Lia Indah, “Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pelayaran Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008”, *Lex et Societatis*, Vol. V No. 3 Mei 2017. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/download/15578/15116>.
- Hattu, Jacob, “Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana

- Khusus”, *Jurnal Belo*, Vol. 6 No. 1 Agustus 2020-Januari 2021.
<https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/belo/article/download/2293/2036/>.
- Kadarisman, Muh., dan Yuliantini, “Formulasi Kebijakan Sistem Transportasi Laut”, *Jurnal Manajemen Transportasi dan Logistik (JMTranslog)*, Vol. 03 No. 2, Juli 2016. <https://media.neliti.com/media/publications/113018-ID-formulasi-kebijakan-sistem-transportasi.pdf>.
- Marlina, Siska, dan Ning Herlina, “Upaya Peningkatan Pendidikan, Keahlian Dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Pelayaran Indonesia”, *Jurnal Ilmiah M-Progress*, Vol. 11, No. 2 Juni 2021.
<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/ilmiahm-progress/article/download/692/668>.
- Pramesti, A.A. Ayu Diali Uthari, dan I Ketut KastaArya Wijaya, “Pengaturan Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran Di Indonesia”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 2 Juli 2021.
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/download/3342/2513/>.
- Pujiati, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pelayaran”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. IV, No. 1, April 2016, hlm. 2.
<https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/277>.
- Ramadhan, Satria, “Penyidikan Tindak Pidana Tanpa Surat Persetujuan Berlayar Oleh Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan Rengat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran”, *JOM Fakultas Hukum*, Vol. III No. 2, Oktober 2016.
<https://media.neliti.com/media/publications/187722-ID-penyidikan-tindak-pidana-tanpa-surat-per.pdf>.
- Rijali, Ahmad, “Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33 Januari-Juni 2018. <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/viewFile/2374/1691>.
- Setiawan, Iwan, ”Beragam Tindak Pidana Laut Dalam Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Galuh Yustisi*, Vol. 4, No 1 Maret, 2016, hlm. 119.
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/415>.
- Siswanto, Ade Hari, “Kewenangan Yuridis Mahkamah Pelayaran Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”, *Lex Journalica*, Vol. 15 No. 3, Desember 2018.
<https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/viewFile/2605/2243>.

- Sulistiawan, Derry, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Dalam Penegakan Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Berlayar”, *Skripsi*, <http://repository.ubb.ac.id/1993/>.
- Sulistiyanta, “Implikasi Tindak Pidana di Luar KUHP Dalam Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No. 2 Mei 2013. <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/202/165>.
- Umbara, Galih, “Kewenangan Penyidik TNI Angkatan Laut Dalam Memberantas Tindak Pidana Pelayaran Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”, *Aktualita*, Vol. 1 No. 1 (Juni) 2018, hlm. 153-172. https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/aktualita/article/view/3716/pdf_1.
- Utami, Sutri, “Pertanggungjawaban Pidana Nakhoda Kapal Dalam Kecelakaan Kapal Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran”. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. VII No. 2 Juli-Desember 2020. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/viewFile/29375/28297>.
- Utomo, Hari, “Siapa Yang Bertanggung Jawab Menurut Hukum Dalam Kecelakaan Kapal (Legally Responsible Parties In Ship Accident)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 01, Maret 2017, hlm. 57-76. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/75/pdf>.

Undang-Undang dan Peraturan Lainnya:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.